



Zakat dan Ketimpangan Pendapatan: Analisis Data BPS dan BAZNAS 2015–2024

Rohmi Fuadi¹, Ubaidillah², Khairul Anwar^{3*}

¹Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Indonesia

^{2,3}STAI Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

Email: rohmi.fuadi@mhs.unsoed.ac.id¹, ubaidillah@staikap.ac.id², khairul.anwar@staikap.ac.id^{3}*

Alamat: JL. Simpang Tiga, Wonopringgo, Sedayu, Pegadeansedayu, Rowokembu, Kec. Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51181

**Penulis Korespondensi*

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of zakat in reducing income inequality in Indonesia. The data used is secondary data from the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Central Statistics Agency (BPS) for the 2015–2024 period. The research method used multiple linear regression with the Ordinary Least Squares (OLS) approach. The results showed that the distribution of zakat had a significant positive effect on the Gini Index ($\beta = 0.0013511$; $p = 0.002$), while the Gross Domestic Product (GDP) per capita had a significant negative effect ($\beta = -0.0000198$; $p = 0.000$). An Adjusted R² value of 0.91 indicates that the model has a very strong ability to explain variations in income inequality. These findings show that although the collection and distribution of zakat has increased from year to year, its impact on reducing inequality has not been optimal. This can be caused by the limited amount of zakat funds collected compared to the real needs of the community and the distribution that is not fully on target. On the other hand, economic growth reflected in the increase in GDP per capita has proven to be still the dominant factor in reducing income inequality in Indonesia. The implications of this study emphasize the importance of optimizing zakat management so that it not only functions as a philanthropic instrument, but also as a sustainable economic instrument. BAZNAS and related institutions are expected to be able to strengthen the zakat distribution system through productive economic empowerment programs, so that zakat can make a real contribution in reducing inequality and supporting more inclusive development in Indonesia.

Keywords: Zakat, Inequality, Gini Index, BAZNAS, GDP per capita

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2015–2024. Metode penelitian menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Gini ($\beta = 0,0013511$; $p = 0,002$), sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berpengaruh negatif signifikan ($\beta = -0,0000198$; $p = 0,000$). Nilai Adjusted R² sebesar 0,91 mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat terhadap variasi ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penghimpunan dan penyaluran zakat meningkat dari tahun ke tahun, dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah dana zakat yang terkumpul dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat serta distribusi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDB per kapita terbukti masih menjadi faktor dominan dalam menekan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan. BAZNAS dan lembaga terkait diharapkan mampu memperkuat sistem distribusi zakat melalui program pemberdayaan ekonomi produktif, sehingga zakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan ketimpangan dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia.

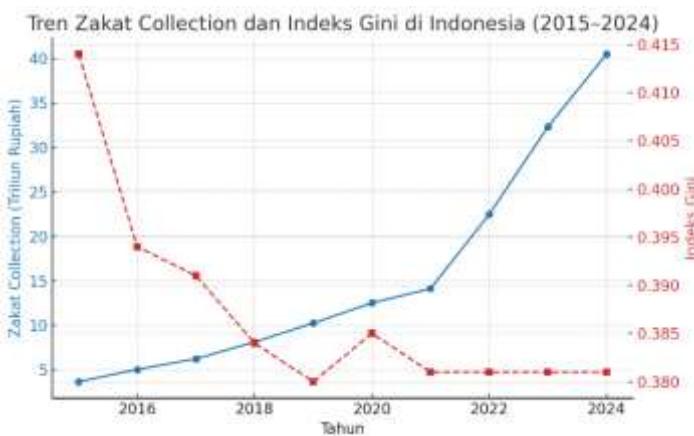
Kata kunci: Zakat, Ketimpangan, Indeks Gini, BAZNAS, PDB per kapita

1. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dalam perspektif kontemporer, zakat diposisikan tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang berperan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Peran zakat dalam pembangunan ekonomi telah menjadi perhatian para akademisi dalam dua dekade terakhir, dan semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Rini et al., 2018).

Urgensi penelitian mengenai zakat sebagai instrumen pengurang ketimpangan didukung oleh fakta bahwa Indeks Gini Indonesia masih bertahan pada level 0,38–0,41 dalam satu dekade terakhir (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode krisis, stagnasi yang terjadi menandakan bahwa kebijakan fiskal dan program sosial konvensional belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, zakat sebagai transfer wajib berbasis agama dapat menjadi alternatif solusi redistributif berkelanjutan (Afraha & Budiwati, 2024). Tren penelitian zakat juga meningkat secara global, dengan (Rosyidi et al., 2024) yang mengaitkannya pada pencapaian SDGs. Relevansi akademik dan urgensi praktis topik ini semakin nyata, terutama karena penghimpunan zakat di Indonesia naik pesat dari Rp 3,65 triliun pada 2015 menjadi Rp 40,51 triliun pada 2024 (BAZNAS, 2024).

Pertumbuhan zakat menunjukkan potensi besar untuk memperluas dampak sosial-ekonomi, namun penurunan ketimpangan belum signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas zakat dalam distribusi pendapatan di tingkat makro (Muttaqin & Nasir, 2024), (Pebruary & Isna Amara, 2024) menemukan ZIS signifikan menurunkan kemiskinan meski kontribusinya pada ketimpangan terbatas. Selanjutnya, (Nurrizka Puji Lestari & Ilmiawan Auwalin, 2022) menunjukkan zakat berpengaruh pada variasi ketimpangan antarprovinsi, namun belum dominan secara nasional.



Gambar 1. Penghimpunan zakat.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, meskipun penghimpunan zakat meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam kurun waktu 2015–2024, Indeks Gini tetap berada pada kisaran 0,38–0,41. Fakta ini memperkuat argumen perlunya evaluasi efektivitas distribusi zakat di tingkat makro.

Kajian literatur terkini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi positif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Misalnya, penelitian (Rohman et al., 2024) menemukan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif. Namun, beberapa studi lain menegaskan bahwa kontribusi zakat terhadap indikator makroekonomi seperti ketimpangan masih terbatas karena proporsi zakat terhadap PDB nasional relatif kecil (Nurfadilah, 2021). Dengan demikian, terdapat dualisme temuan antara efektivitas zakat di level mikro dan dampaknya di level makro. Masalah umum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia meskipun zakat telah dioptimalkan melalui regulasi dan penguatan kelembagaan. Kondisi ini menimbulkan keraguan apakah peningkatan zakat benar-benar mampu mengurangi kesenjangan ataukah efeknya masih belum signifikan dibandingkan faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan literatur, terdapat gap penelitian yang jelas: sebagian besar studi fokus pada dampak zakat terhadap kemiskinan atau kesejahteraan mustahik, sedangkan analisis mengenai kontribusi zakat terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat nasional masih terbatas. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menggunakan data sekunder BAZNAS dan BPS dalam periode 2015–2024, sehingga dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan zakat dan ketimpangan.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana zakat, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran, berpengaruh terhadap Indeks Gini di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif regresi linier, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap literatur ekonomi Islam sekaligus menawarkan masukan praktis bagi kebijakan pengelolaan zakat.

Metodologi penelitian ini berbasis data sekunder tahunan dari BAZNAS (penghimpunan dan penyaluran zakat) dan BPS (Indeks Gini, kemiskinan, dan GDP per kapita). Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji signifikansi pengaruh zakat terhadap ketimpangan, dengan GDP per kapita sebagai variabel kontrol. Temuan awal menunjukkan bahwa walaupun korelasi sederhana zakat dan ketimpangan bersifat negatif, hasil regresi berganda menempatkan GDP per kapita sebagai faktor yang lebih signifikan dalam menjelaskan variasi ketimpangan, sedangkan peran zakat masih terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena empiris terkait zakat dan ketimpangan, tetapi juga menegaskan perlunya reformasi strategi distribusi zakat agar lebih tepat sasaran dan sinergis dengan kebijakan fiskal pemerintah. Harapannya, zakat dapat memainkan peran optimal sebagai instrumen keadilan sosial sekaligus pilar penting dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Zakat

Zakat mal merupakan kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh muzakki ketika harta yang dimiliki telah mencapai nishab dan haul sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Lubis et al., 2022). Hikmah disyariatkannya zakat adalah pemerataan keadilan ekonomi. Berdasarkan studi bibliometrik terbaru, penelitian zakat kini berkembang dengan fokus pada kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Rosyidi et al., 2024), sehingga memperkuat posisinya sebagai kewajiban keagamaan sekaligus instrumen pembangunan ekonomi global.

Anwar (Anwar, 2024) dalam Azis menyebutkan, Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi sumber daya ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar IDR 233 triliun per tahun. Namun, pemanfaatan zakat secara optimal masih menjadi tantangan (Aziz, 2024). Pada tahun 2021, pengumpulan zakat secara kumulatif hanya mencapai IDR 14 triliun. Pada tahun 2024, Baznas menargetkan potensi zakat yang dikelola mencapai IDR 41 triliun, dan IDR 50 triliun pada tahun 2025 (Baznas.go.id, 2024).

Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Zakat adalah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang- orang miskin dan fakir yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk menghapus kesenjangan dan kesengsaraan, kemiskinan masyarakat muslim, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu berbuat kebaikan sesama umat bukan saja hanya dalam makna ibadah mahdah (hubungan vertikal) tetapi dengan makna bagaiman menciptakan tatanan sosial (hubungan horisontal), zakat sebagai pilar Islam memiliki fungsi sosial yang memberi manfaat bagi muzakki dan mustahik, sehingga penyadaran masyarakat untuk menunaikannya sangat penting (Fawwaz et al., 2024).

Menurut (Karunia & Amir, 2024), meskipun dana zakat yang terkumpul di lembaga amil zakat relatif terbatas, pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif tetap mampu memberi dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Mustahik pun menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri untuk jangka panjang. Oleh karena itu, zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu solusi dalam gerakan nasional pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis hubungan antara zakat dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berbasis data numerik sekunder yang dapat dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik Ordinary Least Squares (OLS) menggunakan perangkat lunak Stata 17. Analisis ini dipilih karena sesuai untuk menguji pengaruh variabel independen (zakat) terhadap variabel dependen (Indeks Gini) dengan kontrol variabel makroekonomi (Gujarati & Porter, 2010).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk variabel zakat (penghimpunan dan penyaluran) periode 2015–2024, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk variabel Indeks Gini, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dan tingkat kemiskinan. Pemilihan periode waktu 2015–2024 didasarkan pada ketersediaan data yang konsisten setelah penguatan kelembagaan zakat melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lokasi penelitian bersifat nasional karena mencakup data agregat Indonesia, bukan sampel per provinsi. Selain itu, periode 2015–2024 juga dipilih karena mencerminkan fase pertumbuhan signifikan penghimpunan zakat nasional, dari Rp 3,65 triliun pada 2015 menjadi Rp 40,51 triliun pada 2024. Dengan kata lain, periode ini memberikan konteks empiris yang lebih relevan untuk mengevaluasi efektivitas zakat

terhadap ketimpangan dalam dinamika ekonomi Indonesia modern, ketika kebijakan zakat mulai diintegrasikan dengan program pembangunan nasional.

Instrumen penelitian berupa tabel dataset sekunder dengan variabel-variabel yang telah ditentukan. Untuk memperjelas, kisi-kisi instrumen penelitian ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Instrumen Penelitian.

Variabel Penelitian	Jenis Variabel	Indikator/Satuan Ukur
Indeks Gini	Dependen (Y)	Rasio Gini (0–1)
Zakat Collection	Independen (X1)	Jumlah penghimpunan zakat nasional (triliun rupiah/tahun)
Zakat Distribution	Independen (X2)	Jumlah penyaluran zakat nasional (triliun rupiah/tahun)
GDP per Capita	Kontrol (X3)	Nilai PDB per kapita (ribu rupiah/tahun)
Poverty Rate	Kontrol (X4)	Persentase penduduk miskin (%)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menghimpun data dari laporan tahunan resmi, publikasi statistik daring, serta laporan keuangan yang dipublikasikan BAZNAS. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder resmi, uji validitas dilakukan dengan cross-check antar-sumber (misalnya membandingkan data BAZNAS dengan publikasi Kementerian Keuangan). Reliabilitas instrumen dijamin karena data bersumber dari lembaga resmi yang kredibel.

Populasi penelitian mencakup seluruh data makro zakat dan ketimpangan di Indonesia, dengan sampel periode tahunan 2015–2024 sebanyak 10 observasi. Jumlah ini dinilai representatif untuk analisis time-series sederhana karena data bersifat agregat nasional. Rekomendasi ini sejalan dengan (Rosyidi et al., 2024) yang menekankan pentingnya penelitian zakat lebih luas, mencakup keberlanjutan, integrasi data, dan keterkaitan dengan indikator makroekonomi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk melihat tren zakat, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, dan PDB per kapita. Kedua, dilakukan analisis korelasi Pearson untuk menguji kekuatan dan arah hubungan antarvariabel. Ketiga, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan model sebagai berikut:

$$GINI_t = \alpha + \beta_1 ZCOL_t + \beta_2 ZDIS_t + \beta_3 GDP_{pct} + \varepsilon_t$$

Dengan $GINI_t$ adalah Indeks Gini pada tahun t, $ZCOL_t$ adalah penghimpunan zakat, $ZDIS_t$ adalah penyaluran zakat, dan GDP_{pct} adalah Produk Domestik Bruto per kapita.

Untuk memastikan kredibilitas data dan hasil analisis, dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan test, serta uji normalitas residual. Jika ditemukan masalah

heteroskedastisitas, analisis dilengkapi dengan robust standard error. Uji signifikansi dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p-value) pada taraf kepercayaan 5%.

Dengan rancangan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang valid dan reliabel mengenai peran zakat dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan dinamika yang kontras antara pertumbuhan zakat dan stabilitas ketimpangan pendapatan selama periode 2015-2024. Penghimpunan zakat mengalami akselerasi pertumbuhan eksponensial dengan rata-rata Rp 15,52 triliun per tahun dan deviasi standar Rp 12,41 triliun, mencerminkan volatilitas yang tinggi akibat tren peningkatan yang sangat tajam dari Rp 3,65 triliun pada 2015 menjadi Rp 40,51 triliun pada 2024. Pola serupa terlihat pada penyaluran zakat dengan rata-rata Rp 14,11 triliun dan rentang distribusi antara Rp 2,25-39,51 triliun.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (2015-2024).

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Zakat_Collection	10	15.518	12.413	3.65	40.51
Zakat_Distribution	10	14.111	12.827	2.25	39.51
Indeks_Gini	10	0.3872	0.0105	0.380	0.414
GDP_per_Capita	10	10,848.01	1,237.40	8,982.52	12,920.28

Sumber: Data sekunder BAZNAS dan BPS (diolah)

Sebaliknya, Indeks Gini menunjukkan stabilitas relatif dengan rata-rata 0,3872 dan deviasi standar hanya 0,0105, mengindikasikan pergerakan yang sangat terbatas dalam rentang 0,380-0,414. GDP per kapita menunjukkan tren pertumbuhan steady dengan koefisien variasi sebesar 11,4%, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten namun tidak volatil.

Analisis Korelasi

Matrix korelasi Pearson mengungkapkan pola hubungan yang kompleks antarvariabel penelitian. Hubungan antara penyaluran zakat dan Indeks Gini menunjukkan korelasi negatif moderat ($r = -0,5447$), sejalan dengan hipotesis teoretis bahwa peningkatan distribusi zakat berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan.

Tabel 3. Matrix Korelasi Pearson.

	Penyaluran Zakat	Indeks Gini	GDP per Kapita
Zakat_Distribution	1.0000		
Indeks_Gini	-0.5447	1.0000	
GDP_per_Capita	0.9416	-0.7767	1.0000

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Stata 17

GDP per kapita menunjukkan korelasi positif sangat kuat dengan penyaluran zakat ($r = 0,9416$) dan korelasi negatif kuat dengan Indeks Gini ($r = -0,7767$). Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan ekspansi kapasitas zakat sekaligus reduksi ketimpangan.

Hasil Estimasi Regresi

Estimasi regresi sederhana antara penyaluran zakat dan Indeks Gini menghasilkan koefisien negatif sebesar $-0,0004475$ dengan $R^2 = 0,2967$. Meskipun arah hubungan sesuai dengan ekspektasi teoretis, pengaruh zakat tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% ($p\text{-value} = 0,103$).

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Sederhana.

indeks_gini	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf.]	interval]
zakat_distribution	-0.0004475	.0002436	-1.84	0.103	-.0010093	.0001142
cons	.3935153	.0045392	86.69	0.000	.3830478	.4039828

$R^2 = 0.2967$; Adjusted $R^2 = 0.2088$ F-statistik = 3.38 Prob > F = 0.1035

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Stata 17

Penambahan GDP per kapita sebagai variabel kontrol mengubah hasil estimasi secara dramatis. Model regresi berganda menghasilkan $R^2 = 0,91$ dengan F-statistik yang sangat signifikan (35,39; $p = 0,0002$), menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 91% variasi ketimpangan pendapatan.

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Berganda.

indeks_gini	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf.]	interval]
zakat_distribution	.0013511	.0002766	4.88	0.002	.0006971	.0020052
gdp_per_capita	-0.0000198	2.87e-06	-6.91	0.000	-.0000266	-.000013
cons	.582945	.0274832	21.21	0.000	.5179576	.6479324

$R^2 = 0.91$; Adjusted $R^2 = 0.8843$; F-statistik = 35.39; Prob > F = 0.0002

Catatan: signifikan pada 5%; signifikan pada 1%

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Stata 17

Dalam model berganda, penyaluran zakat menunjukkan koefisien positif dan signifikan secara statistik ($\beta = 0,0013511$, $p = 0,002$), sementara GDP per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan ($\beta = -0,0000198$, $p = 0,000$).

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis zakat seharusnya berfungsi sebagai instrumen redistribusi untuk menurunkan ketimpangan, pada tingkat makro nasional kontribusinya justru muncul dengan arah positif. Artinya, peningkatan nominal zakat belum cukup kuat menekan ketimpangan, kemungkinan besar karena sebagian besar zakat masih disalurkan dalam bentuk konsumtif dan skala penghimpunannya relatif kecil dibandingkan PDB nasional. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan GDP per kapita terbukti lebih konsisten menurunkan ketimpangan. Dengan R^2 sebesar 0,91, model ini mampu menjelaskan variasi ketimpangan dengan baik, meskipun interpretasi harus dilakukan hati-hati mengingat adanya multikolinearitas tinggi antarvariabel zakat.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai 8,81 untuk kedua variabel independen, mengindikasikan adanya multikolinearitas tinggi yang perlu mendapat perhatian dalam interpretasi hasil. Uji Breusch-Pagan menghasilkan chi-square = 9,06 dengan p-value = 0,0026, menolak hipotesis nol homoskedastisitas dan mengkonfirmasi adanya heteroskedastisitas dalam model.

Pembahasan

Temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa zakat collection dan zakat distribution berkoefisien positif signifikan terhadap Indeks Gini memperlihatkan adanya keterbatasan peran zakat di tingkat makroekonomi, karena besaran penghimpunan zakat masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan redistribusi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nurfadilah, 2021), yang menyatakan bahwa kontribusi zakat terhadap ketimpangan nasional masih relatif kecil karena besaran penghimpunan zakat di Indonesia belum proporsional dibandingkan dengan kebutuhan redistribusi ekonomi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Pebruary dan Amara (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berkontribusi nyata dalam menurunkan kemiskinan, pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia masih belum signifikan. Dengan total penghimpunan Rp 40,51 triliun pada 2024, porsi zakat masih kurang dari 0,2% PDB Indonesia. Angka ini terlalu kecil untuk menekan ketimpangan struktural, meskipun secara mikro zakat terbukti mampu mengangkat pendapatan mustahik (Rohman et al., 2024). Hasil tersebut sejalan juga dengan penelitian (Jaffer, 2022) yang menunjukkan bahwa zakat hanya akan berdampak signifikan dalam menurunkan ketimpangan apabila disalurkan secara produktif dan terarah, bukan semata konsumtif

Dalam perspektif internasional, kondisi Indonesia serupa dengan pengalaman beberapa negara lain. Studi (Hawariyuni et al., 2021) menemukan bahwa zakat terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan, namun dampaknya terhadap penurunan ketimpangan relatif kecil, sehingga menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola dan kepatuhan muzakki agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen redistribusi. Sebaliknya,(Mukhlisah et al., 2024) membandingkan praktik zakat di Malaysia, Turki, dan Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat bergantung pada regulasi dan tata kelola otoritas resmi. Malaysia menonjol dengan sistem terpusat berbasis teknologi yang meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi. Implikasinya, tingkat kepercayaan dan kepatuhan muzakki meningkat sehingga zakat lebih optimal dalam memperkuat kesejahteraan sosial. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kelembagaan zakat di Indonesia masih perlu diperkuat, khususnya pada regulasi, integrasi data muzakki, dan digitalisasi penghimpunan.

Relevansi hasil ini juga dapat dijelaskan melalui teori ekonomi Islam klasik. Ibn Khaldun menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan sebagai prasyarat stabilitas sosial. Menurutnya, pajak dan pungutan berlebihan akan mengurangi insentif ekonomi, sementara distribusi kekayaan yang adil dapat mendorong produktivitas masyarakat (Islahi, 2015). Penelitian (Flores et al., 2025) menegaskan bahwa zakat memiliki potensi signifikan dalam mendorong tercapainya keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, efektivitas zakat seringkali terhambat oleh inefisiensi dalam penghimpunan, distribusi, serta pemanfaatan dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat tidak hanya ditentukan oleh besaran nominal yang terkumpul, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek tata kelola, transparansi, serta ketepatan sasaran penerima. Dengan demikian, zakat baru dapat optimal sebagai instrumen redistributif apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah dan keadilan social. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun arah pengaruh zakat sesuai dengan teori, implementasi kelembagaan di Indonesia masih menjadi kendala utama.

Temuan signifikansi GDP per capita terhadap Indeks Gini memperkuat argumen teori pertumbuhan inklusif. Menurut (Stiglitz, 2015), ketimpangan bukanlah fenomena alamiah, melainkan hasil dari kebijakan ekonomi dan struktur pasar yang bias terhadap kelompok tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kebijakan redistributif akan memperlebar kesenjangan, sementara intervensi negara melalui mekanisme redistribusi—seperti perpajakan progresif, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja—dapat menurunkan ketimpangan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif.. Dalam kasus Indonesia, kenaikan GDP per capita terbukti konsisten dengan perbaikan Indeks Gini,

meskipun relatif lambat. Hal ini menunjukkan bahwa peran zakat dalam menekan ketimpangan belum mampu menandingi efek pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, zakat seharusnya diposisikan sebagai instrumen pelengkap, bukan pengganti kebijakan makroekonomi.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya reformasi strategi distribusi zakat agar lebih tepat sasaran. Saat ini, sebagian besar zakat masih disalurkan dalam bentuk konsumtif, misalnya bantuan tunai dan kebutuhan pokok. Meskipun bermanfaat untuk jangka pendek, dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan jangka panjang sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu didorong program zakat produktif yang lebih luas, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan integrasi dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Dengan sinergi antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah, zakat dapat diarahkan sebagai modal sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi metodologi, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, jumlah observasi relatif kecil (hanya 10 tahun), sehingga kekuatan statistik terbatas. Kedua, terdapat potensi multikolinearitas antara variabel zakat collection dan zakat distribution yang saling berkorelasi sangat tinggi ($r > 0.9$). Hal ini mungkin memengaruhi signifikansi koefisien dalam model regresi. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan data agregat nasional, sehingga tidak menangkap variasi regional. Padahal, distribusi zakat di provinsi tertentu bisa lebih efektif dalam menekan ketimpangan lokal dibandingkan level nasional. Kelemahan-kelemahan ini memberikan ruang bagi penelitian lanjutan.

Untuk pengembangan penelitian ke depan, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, penggunaan data panel antarprovinsi atau antarwilayah akan memperkaya analisis dengan jumlah observasi yang lebih besar serta memungkinkan eksplorasi perbedaan efektivitas zakat secara regional. Kedua, pendekatan kuantitatif dapat dipadukan dengan analisis kualitatif (mixed methods), misalnya dengan wawancara atau studi kasus pengelolaan zakat di daerah tertentu. Hal ini akan membantu memahami faktor kelembagaan, perilaku muzakki, serta efektivitas program distribusi. Ketiga, penelitian dapat menambahkan variabel kontrol lain seperti belanja sosial pemerintah, pajak progresif, dan indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan ketimpangan.

Dengan perluasan pembahasan ini, penelitian menegaskan bahwa zakat tetap memiliki arah pengaruh yang sejalan dengan teori redistribusi dalam Islam, tetapi efektivitasnya pada tingkat makro masih terbatas. Untuk memperkuat dampaknya, diperlukan reformasi distribusi zakat agar lebih produktif, terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, dan berbasis pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi ibadah

individual, tetapi juga pilar strategis dalam pembangunan ekonomi Islam dan pengurangan ketimpangan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah zakat berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2015–2024 dengan menggunakan data sekunder dari BAZNAS dan BPS. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat collection dan zakat distribution memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Gini, yang berarti peningkatan zakat justru berkorelasi dengan meningkatnya ketimpangan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual zakat berpotensi menekan ketimpangan sesuai teori redistribusi Islam, mekanisme distribusi yang masih dominan konsumtif membuat kontribusinya pada tingkat makro nasional belum optimal.

Sebaliknya, GDP per capita terbukti berpengaruh negatif signifikan dalam menurunkan ketimpangan pada taraf kepercayaan 5%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap menjadi faktor utama dalam memperbaiki distribusi pendapatan di Indonesia. Dengan nilai Adjusted R² sebesar 0,91, model penelitian ini cukup mampu menjelaskan variasi Indeks Gini, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model yang memengaruhi ketimpangan, seperti kebijakan fiskal, program sosial, dan dinamika pasar tenaga kerja.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian adalah bahwa zakat memang memiliki arah pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi efeknya belum signifikan dalam konteks makro nasional. Zakat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pada level mikro rumah tangga mustahik dibandingkan mengurangi ketimpangan agregat. Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa zakat perlu diposisikan sebagai instrumen pelengkap kebijakan fiskal dan program redistribusi pemerintah. Untuk memperkuat dampaknya terhadap ketimpangan, zakat sebaiknya difokuskan pada program produktif seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek. Digitalisasi penghimpunan dan integrasi data muzakki secara nasional juga penting untuk memperluas basis pembayaran serta meningkatkan transparansi. Selain itu, sinergi antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah perlu diperkuat agar distribusi zakat lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan inklusif.

Sebagai tindak lanjut, penelitian di masa mendatang dapat diarahkan pada beberapa hal. Pertama, menggunakan data panel antarprovinsi untuk melihat variasi efektivitas zakat di tingkat regional, karena efektivitas distribusi zakat kemungkinan berbeda antarwilayah. Kedua,

mengintegrasikan variabel kontrol lain seperti belanja sosial pemerintah, pajak progresif, dan indeks pembangunan manusia (IPM) untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Ketiga, mengombinasikan metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif (mixed methods), misalnya melalui wawancara atau studi kasus pengelolaan zakat di daerah tertentu, agar dapat menggali faktor kelembagaan, perilaku muzakki, serta efektivitas program zakat produktif.

Dengan langkah tindak lanjut tersebut, penelitian mengenai zakat tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pilar penting pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan demikian, zakat bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afraha, M. N., & Budiwati, A. (2024). Internalisasi zakat fungsional sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 10(2), 189–200. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i2.7773>
- Anwar, K. (2024). Green zakat concept: A strategy for utilizing zakat funds for environmental sustainability. International Conference of Zakat 2024 Proceedings, 1–7.
- Aziz, M. A. (2024). Dompet Dhuafa: Membangun ekonomi berkelanjutan melalui zakat dan inovasi sosial. Dompet Dhuafa. <https://dmc.dompetdhuafa.org>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Distribution of expenditure per capita and Gini index, 2010–2024. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table?subject=523>
- BAZNAS. (2024). Laporan zakat nasional 2024. <https://baznas.go.id/>
- Fawwaz, M. D., Indrasari, W., & Putri, Z. A. S. (2024). Rasionalitas ekonomi kewajiban zakat. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 5(2), 113–123. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v5i2.7171>
- Flores, J., Santos, L., & Tariq, U. (2025). Shariah law and economic justice: Analyzing the impact of zakat on income distribution in Indonesia. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 3(1), 104–115. <https://doi.org/10.70177/solj.v3i1.2085>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Basic econometrics. McGraw-Hill Education.
- Hawariyuni, W., Al-Balushi, S., & Abdullah, N. (2021). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities in Indonesia: A measurement using a newly developed technique. *Humanistic*, 31(3), 485–492. <https://doi.org/10.5220/0009259304850492>
- Islahi, A. A. (2015). Ibn Khaldun's theory of taxation and its relevance. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.2.1-19>

- Jaffer, M. A. (2022). Zakat charity and wealth distribution: An agent-based computational model. International Journal of Zakat, 7(1), 63–74. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.340>
- Karunia, S. O. F., & Amir, F. (2024). Productive zakat distribution in improving mustahik welfare: CIBEST model approach. Journal of Enterprise and Development (JED), 6(2), 291–299. <https://doi.org/10.20414/jed.v6i2.9723>
- Lubis, D., Awiwin, A., & Mahanani, Y. (2022). Determinants of muzakki decision to pay agricultural zakat through institutions in West Java. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 11(2), 387–407. <https://doi.org/10.22373/share.v11i2.14674>
- Mukhlisin, Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat maal management and regulation practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 4(2), 569–592. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204>
- Muttaqin, Z., & Nasir, M. D. A. (2024). Can zakat contribute to achieving sustainable development goals? A case study on Java Island, Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 11(1), 35–53. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp35-53>
- Nurfadilah, K. (2021). Peranan umat Islam terhadap perekonomian Indonesia: Pengaruh zakat, infaq dan sedekah terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Jurnal MSA (Matematika dan Statistika serta Aplikasinya), 9(2). <https://doi.org/10.24252/msa.v9i2.24083>
- Nurrizka, P. L., & Auwalin, I. (2022). Zakat and income inequality in Indonesia: Panel data analysis in 34 provinces. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(6), 898–912. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp898-912>
- Pebruary, S. P., & Amara, I. (2024). The relationship between zakat, infaq, sadaqah, economic factors with poverty in Indonesia. J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 9(2), 217–240. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v9i2.9463>
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2018). Peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 17(1), 108–127. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.269>
- Rohman, T., Hasan, N., & Saputra, R. (2024). Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi, 8(1), 155–163.
- Rosyidi, L. N., Sukmaningrum, P. S., & Widiastuti, T. (2024). Bibliometric analysis of zakat research for supporting SDGs. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 10(1), 165–189. <https://doi.org/10.20473/jebis.v10i1.54251>
- Stiglitz, J. E. (2015). The origins of inequality and the policy to contain it. National Tax Journal, 68(2), 425–448. <https://doi.org/10.17310/ntj.2015.2.09>